ABSTRAK

Salah satu kerjasama waralaba *(franchise)* dibidang kuliner adalah minuman jenis Thai Tea. Sistem waralaba memberikan hak bagi penerima waralaba untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual bagi penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta, desain industry, paten maupun rahasia dagang melalui perjanjian waralaba *(franchise)*. Khab Khun Thai Tea merupakan sistem bisnis waralaba. Dalam pelaksanaan perjanjian ini *franchisor* telah melakukan wanprestasi dengan melanggar kewajiban yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Tujuan dari penyusunan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh *franchisor* terhadap *franchisee* dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* untuk mendapatkan perlindungan hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisor*. Metode yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode yuridis normatif, karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh dan sistematis mengenai yang terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Khab Khun Thai Tea menunjukkan bahwa Bentuk Wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisor* adalah *franchisor* tidak sigap dalam melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan serta fasilitas dalam hal sering kosongnya bahan baku dan terlambat memasok bahan baku kepada *franchisee* sehingga menghambat pengembangan gerai usaha waralaba tersebut dan mengakibatkan kerugian materiil bagi *franchisee*.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *franchisee* untuk mendapatkan perlindungan atas wanprestasi yang dilakukan *franchisor* adalah dapat dilakukan dengan cara non litigasi (di luar Pengadilan) dan litigasi (di dalam Pengadilan). Alternatif penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Sedangkan yang berwenang melakukan jalur litigasi adalah Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi

ABSTRACT

One of the franchise partnerships in the culinary field of beverages is Thai Tea. The franchise system gives franchisees the right to use intellectual property rights for trademarks, service marks, copyrights, industrial designs, patents or trade secrets through franchise agreements. Khab Khun Thai Tea is a system of franchise business. Based on observation, in the implementation of franchise business will be any possibility of default.

The purpose of this research is to study and analyze the forms of default that can be carried out by the franchisor against the franchisee and to study and analyze the legal effort that can be carried out by the franchisee to obtain legal protection for the defaults committed by the franchisor. The method that is used in this thesis preparation is a normative juridical method, because this legal research uses data from library materials (secondary data) and data obtained directly from sources or respondents (primary data). The specifications given are descriptive analysis, which provides a complete, comprehensive and systematic picture of what is happening.

The results of this study indicate that in the implementation of the Khab Khun Thai Tea franchise agreement shows that the Default performed by the franchisor is the franchisor is not spry in its implementation by providing assistance and facilities in matters relating to empty stock raw materials and the delay of giving the raw materials to franchisee thus hampering the development of the franchise and resulting in material losses for the franchisee

The legal effort that can be done by the franchisee to obtain protection from defaults made by the franchisor can be done by non-litigation (outside the court) and litigation (inside the court). Alternative non-litigation dispute resolution can be done by negotiation, mediation, arbitration and conciliation. Meanwhile the authority to conduct litigation is the Commercial Court.

Keywords: Legal Protection, Franchise Agreement, Default